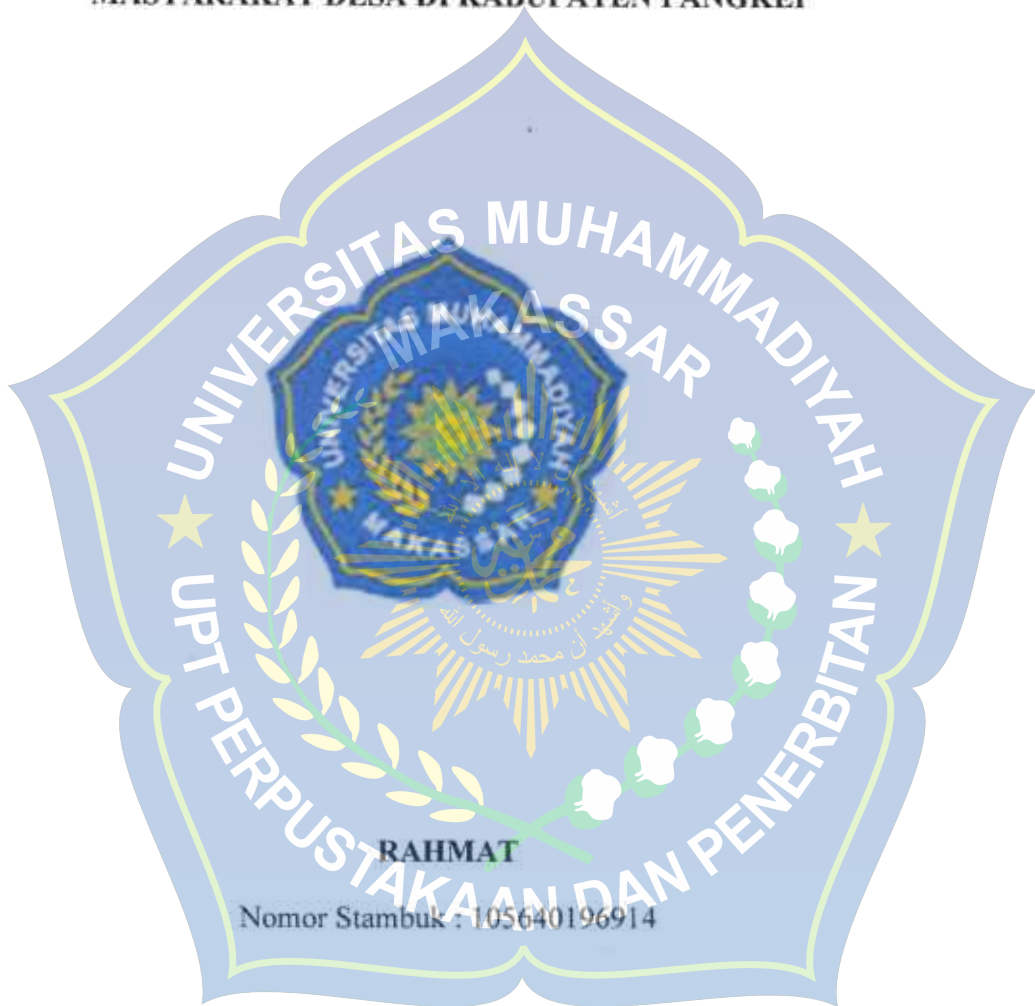


SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN PANGKEP**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

STRATEGI PEMERINTAH DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN PANGKEP

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Pemerintahan (S.IP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

RAHMAT

Nomor Stambuk : 105640196914

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

05/02/2022

1009
Sub. Alimmi

P/0041/IPM/22 40
RAM
30

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa: Rahmat

Nomor Stanbuk: 105640196914

Program Studi: Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah hasil penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak yang lain atau telah ditulis di publikasikan orang lain atau melalui plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima konsekuensinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 31 Januari 2022

Yang menyatakan

Rahmat

Abstrak

Rahmat, Amir Muhiddin, Ahmad Taufiq : Strategi Pemerintah Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Pangkep

Program pengembangan masyarakat desa adalah sebuah bentuk kegiatan yang sangat penting guna menciptakan masyarakat desa yang mandiri dan jauh dari kata tertinggal. Olehnya itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Desa serta untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi strategi Pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat Desa di kabupaten Pangkep. . Jenis penelitian ini bersipat kualitatif dengan menggunakan tipe penelitian fenomenologi dimana tipe ini mengamati sesuatu berdasarkan fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi yang kemudian diolah keabsahan datanya menggunakan metode reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitianpenelitian menunjukan bahwa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten pangkep dalam program pemberdayaan masyarakat desa, tergolong hampir maksimal dimana sumberdaya yang dikembangkan cukup banyak serta yang melakukan pembimbingan adalah mereka yang memiliki kemampuan dibidangnya masing-masing. Begitu pula tingkat efisien dan keefektipanya, sangat menghemat waktu juga tenaga karna program ini dilakukan di tiap desa sehingga jarak tempuh masyarakat tidak jauh, hal ini menunjukan bahwa program ini telah mencapai target atau tujuan yang diinginkan meskipun belum maksimal sepenuhnya, akan tetapi dengan lahirnya program ini itu memberikan dampak yang luar biasa bagi perubahan masyarakat Desa.

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pangkep”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada lembaran ini penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada bapak **Amir Muhiddin, S.Sos., M.Si** dan **Ahmad Taufik, S.IP., M.Si** selaku pembimbing I dan pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua terkasih Ayahanda **Abdul Samad** dan Ibunda tercinta **Hj. Rosnaeni** atas semua segala cinta dan kasih sayang yang telah diberikan serta segenap do'a yang dipanjatkan dalam mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh keikhlasan. Juga buat semua saudaraku **Dedi Risaldi, S.Sos, Anna Erviana** dan **Risma Yuliana** yang selalu memberiku semangat, motivasi dan memberi dukungan baik moril maupun non moril.

Tak lupa penulis haturkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu **Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu **Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si** selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak **Rudi Hardi, S.Sos., M.Si** selaku penasehat akademik yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
4. **Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan** yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Seluruh **Staf dan Pegawai Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL** Universitas Muhammadiyah Makassar terima kasih atas segala bantuannya selama ini.
6. Teman-teman seperjuanganku di jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Muhammadiyah Makassar terima kasih atas bantuan dan motivasinya selama ini.

Dan kepada rekan, Sahabat, saudara dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terimakasih atas setiap bantuan dan doa yang diberikan.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekeliruan dan kesalahan oleh karena itu saran dan kritiknya sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga segala bantuan, petunjuk, dorongan dan pengorbanan yang telah diberikan yang memungkinkan terselesaikannya skripsi ini, bernilai ibadah dan memperoleh imbalan yang berlipat ganda disisi Allah SWT, Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar,

2021

Penulis,

R a h m a t

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENERIMAAN TIM	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan	5
D. Manfaat Penelitian	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Konsep Strategi.....	7
C. Pemerintah Daerah.....	14
D. Pemberdayaan.....	16
1. Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	18
2. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	22
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	25
4. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Desa	28
E. Kerangka Fikir.....	29

F. Fokus Penelitian	29
G. Deskripsi Fokus Penelitian	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
B. Tipe Penelitian	34
C. Informan	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknik Analisis Data	36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	38
B. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pangkep	43
C. Strategi Pemberdayaan Pemerintah	52
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberdayaan	58

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	61
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat di era globalisasi menghadapkan kita pada tantangan yang besar. Tantangan itu terlihat dalam ketidakstabilan ekologi, ekonomi, politik, sosial, dan kultural yang tampak nyata dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia, degradasi lingkungan, eksploitasi ekonomi dan politik. Melihat tantangan yang kompleks ini, kebutuhan akan pemberdayaan masyarakat desa yang secara khusus diharapkan mampu merespon kondisi dan permasalahan masyarakat desa yang sangat spesifik di masing-masing wilayah, membangun strategi pemberdayaan masyarakat yang mampu mendorong terwujudnya konsep desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah dengan membangkitkan dan mempertautkan segenap potensi kemampuan para pihak pada tingkat lokal itu sendiri, membangun pemberdayaan yang memiliki perspektif jangka panjang dan tetap memegang teguh prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa diperbarui dengan Permendesa PD TT 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Peraturan Menteri Desa PD TT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ini mengatur mengenai : Arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pembinaan.

Konsep pemberdayaan masyarakat adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal social kelompok untuk menjadikan kelompok produktif untuk mencapai kesejahteraan sosial. Modal sosial yang kuat akan menjamin sustainable didalam

membangun rasa kepercayaan di dalam masyarakat khususnya anggota kelompok (*how to build the trust*).

Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya (Mubarak, 2010).

Permendesa PDIT 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ini diterbitkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemberdayaan masyarakat dapat merupakan suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat, yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat.

Pengorganisasian masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan. Masyarakat dapat membentuk kelompok kerja, melakukan pembagian

tugas, saling mengawasi, merencanakan kegiatan, dan lain-lain. Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah.

Dalam rangka mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat, dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengadakan pelatihan atau mengikutkan masyarakat pada pelatihan-pelatihan pengembangan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Perlu memberikan penyadaran apa yang mereka harus lakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan banyak informasi dengan menggunakan berbagai media, seperti buku-buku bacaan, mengajak untuk melihat tempat lain, studi banding dan masih banyak yang lain.

Pada pengorganisasian masyarakat, kuncinya adalah menempatkan masyarakat sebagai pelakunya. Untuk itu masyarakat perlu diajarkan mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, sampai pemeliharaan dan pelestarian. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul "Strategi Pemerintah Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Pangkep", tentunya dengan pendekatan penelitian menggunakan acuan ilmu dan teori Ilmu Pemerintahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Pariwisata Di Kabupaten Jombang (Studi Kasus Pada Taman Tirta Wisata Keplaksari Kabupaten Jombang). Retno Puji Rahayu (2015). Dengan kesimpulan bahwa strategi dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Jombang khususnya pada Taman Tirta Wisata Keplaksari agar tempat wisata ini lebih menarik dan banyak diminati oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Jombang sudah berjalan secara optimal.

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Obyek Wisata Oleh Kelompok Sadar Wisata Dewabejo Di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Nur Rika Puspita Sari, Nur (2015). Dengan kesimpulan bahwa: 1) Program yang dilakukan Kelompok Sadar Wisata Dewabejo dalam mengembangkan obyek wisata sebagai usaha memberdayakan masyarakat, diantaranya pelatihan manajemen organisasi, pelatihan Standart Operating Procedure, pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pelatihan pemanduan, pelatihan pengenalan batu karst, dan pelatihan tata ruang yang baik. 2) Kontribusi Kelompok Sadar Wisata Dewabejo dalam mengembangkan obyek wisata sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, meliputi pemikiran, penyediaan fasilitas akomodasi, dan memberikan inisiatif sumbangsih dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pariwisata disana, 3) Bentuk pemberdayaan dan perubahan yang ada di masyarakat dengan adanya Kelompok Sadar Wisata Dewabejo meliputi filosofi hidup, sikap, pendidikan, keterampilan, aturan bermasyarakat, adat, dan penampilan.

Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah Di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Ayu Purnami Wulandari (2014). Dengan kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat desa melalui Pelatihan pembuatan Sapu Gelagah di desa Kajongan sudah sesuai dengan tahap pemberdayaan. Tahapan pelaksanaan pemberdayaan yaitu perencanaan, pendampingan, evaluasi dan tindak lanjut. Perencanaan dilakukan melalui musyawarah yang meliputi identifikasi kebutuhan, latar belakang, tujuan, pembentukan struktur kepengurusan dan rekrutmen anggota warga belajar. Selanjutnya pendampingan dilakukan pada proses produksi dengan mempraktekkan dan memantau cara pembuatan sapu oleh pengelola, evaluasi dilakukan dengan menargetkan hasil produksi yang akan berpengaruh terhadap penghasilan warga belajar, kemudian tindak lanjut yang dilakukan pengelola yaitu menyiapkan keterampilan lain dan diharapkan masyarakat bisa membuka usaha mandiri.

B. Strategi Pemerintah

Secara etimologi strategi merupakan sesuatu yang berasal dari kata yang dalam bahasa Yunani, *stratego*. Adapun *stratego* yang merupakan terjemahan yang dapat diartikan sebagai “komandan militer” yang berasal dari zaman demokrasi Athena.

Pada umumnya istilah strategi digunakan untuk memenangkan suatu peperangan dalam permasalahan dunia militer yang sebagai cara digunakan untuk memanfaatkan kekuatan militer. Sedangkan terminologi strategi banyak ahli yang telah mengemukakan sudut pandang yang berbeda-beda tentang strategi, namun pada dasar hakikatnya itu mempunyai arti atau makna yang sama yakni pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut pendapat Argyris, dkk (Hutapea, 2017) Strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan

peluang suatu rangkaian dari keputusan manajerial yang meliputi analisis lingkungan eksternal dan internal, formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi dan kontrol guna mengatasi permasalahan dan untuk memenuhi tujuan dari organisasi

1. Tahap-tahap strategi

Tahap strategi merupakan penyelesaian masalah-masalah yang sedang dihadapi dalam pengambilan keputusan yang dibuat untuk menemukan langkah yang tepat dari masalah tersebut. Dalam hal ini agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan, strategi yang dibuat bisa diimplementasikan dalam penyelesaian masalah yang terjadi, sehingga tolak ukur strategi akan dapat diukur dari implementasinya.

Menurut Haryadi (2005) berpendapat bahwa ada dua tahap strategi, kedua tahap strategi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perumusan

Menjelaskan tahap pertama dari bagian yang meliputi analisis lingkungan internal maupun eksternal adalah penetapan visi, dan misi, perencanaan dan tujuan strategi. Perumusan strategi bagian dan proses dalam menyusun langkah-langkah yang akan datang agar bisa membangun visi dan misinya dari perumusan tersebut dapat merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut agar tercapainya penyediaan customer value terbaik.

b. Pelaksanaan

Setelah tahap perumusan strategi dapat terselesaikan maka selanjutnya tahap krusial dalam strategi pemerintah adalah tentang pelaksanaan strategi. Pelaksanaan strategi adalah proses dimana strategi dan kebijakan dijalankan melalui pembangunan struktur, pembangunan program, budget dan pelaksanaan. Pelaksanaan strategi merupakan tahap yang paling sulit dalam proses strategi mengingat banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan di lapangan dan tidak sesuai dengan perkiraan semula.

Keberhasilan dalam strategi tentunya harus didukung perusahaan yang capable dengan seorang pemimpin yang solid, kebijaksanaan yang tepat, alokasi sumber daya yang cukup, situasi, budaya dan kondisi terhadap keberhasilan dari pelaksanaan strategi. Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa tahap strategi merupakan langkah-langkah dalam pembuatan kebijakan yang tepat dengan merumuskan visi dan misi dari kebijakan tersebut, kemudian setelah dirumuskan dibutuhkan pelaksanaan yang tepat pula agar strategi dari kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya.

2. Jenis- jenis strategi

Ada beberapa instansi atau organisasi yang menjalankan suatu strategi atau lebih secara bersamaan, namun hal tersebut dapat sangat beresiko dan mengancam jika dijalankan terlalu jauh diperusahaan yang besar dan terdiversifikasi, strategi kombinasi biasanya digunakan ketika divisi-divisi yang berlainan menjalankan strategi yang berbeda. Adapula instansi pemerintah atau organisasi yang bertahan untuk tetap hidup dengan menggunakan gabungan dari sejumlah strategi divestasi, seperti likuidasi, dan rasionalisasi biaya secara bersamaan. Adapun jenis-jenis strategi adalah sebagai berikut:

a). Strategi integrasi

Strategi integrasi terbagi 2 macam yaitu integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal kadang semuanya disebut sebagai integrasi vertikal. Suatu strategi integrasi vertikal atau dari atas kebawah dapat memungkinkan perusahaan yang dapat mengendalikan para distributor, pemasok, dan/atau pesaing.

b). Strategi intensif

Penetrasi pasar, dan pengembangan produk kadang disebut sebagai strategi intensif karena semuanya memerlukan usaha-usaha intensif jika posisi persaingan perusahaan dengan produk yang ada hendak ditingkatkan.

c). Strategi diversifikasi

Adapun strategi diversifikasi yang harus dipahami, yaitu diversifikasi horizontal, konglomerat dan konsentrik. Menambah produk atau jasa baru yang tidak disebut diversifikasi konglomerat.

d). Strategi Defensif

Ada tiga strategi defensif yang perlu diketahui adalah strategi rasionalisasi biaya, divestasi, atau likuidasi. Rasionalisasi Biaya, terjadi ketika suatu organisasi melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang menurun.

3. Peranan Strategi

Dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi karena meliputi tindakan dan koordinasi dalam mencapai tujuan. Adapun menurut Grant (1999), strategi mencakup 3 peranan penting dalam mencapai suatu tujuan, yaitu:

- a). Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan
- b). Strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai kesuksesan, strategi suatu hal yang akan memberikan suatu ikatan hubungan antara hasil-hasil dari ide yang diambil oleh individu atau instansi terkait.
- c). Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi

Strategi memiliki peranan penting sebagai sarana koordinasi dan komunikasi agar untuk memberikan kesamaan arah bagi perusahaan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

d). Strategi sebagai target

Konsep strategi akan disatukan dengan suatu visi dan misi untuk menuntukan dimana perusahaan berada dalam masa yang akan datang. Menetapkan suatu tujuan dapat membantu

seorang individu dapat didengarkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

4. Prinsip-prinsip mensukseskan strategi

Menurut Hatten dan Hatten (1998) dalam Salusu menjelaskan tentang petunjuk untuk mensukseskan strategi:

- 1). Strategi harus mempunyai konsistensi dengan lingkungan. Dalam hal ini pembuatan strategi hendaklah jangan bertentangan dengan arus perkembangan masyarakat.
- 2). Organisasi jangan hanya membuat satu strategi, keadaan tersebut tergantung pada ruang lingkup kegiatannya.
- 3). Strategi yang efektif memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya dan tidak memisahkannya.
- 4). Strategi harusnya lebih memperhatikan pada sesuatu yang merupakan kekuatannya (strengths) dan tidak hanya pada sesuatu hal yang justru adalah kelemahannya (weakness).
- 5). Sumber daya adalah sesuatu yang kritis.
- 6). Penyusunan suatu strategi juga harus memperhitungkan resiko kecil agar nantinya tidak menjadi sebuah ancaman dalam organisasi.
- 7). Strategi hendaknya disusun diatas landasn keberhasilan yang telah dicapai.

5. Tipe-tipe Strategi

Setiap organisasi pasti memiliki strategi untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi tidaklah sama. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Jack Kooten (1991:81), tipe - tipe strategi meliputi:

- a. Corporate Strategy (Strategi Organisasi)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai - nilai, dan inisiatif - inisiatif strategi yang baru. Pembatasan - pembatasan diperlukan yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk siapa.

b. Program Strategy (Strategi Program)

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi - implikasi strategi dari program tertentu. Kira - kira apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi).

c. Resource Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya)

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber- sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi. sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber- sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya.

d. Institusional Strategy (Strategi Kelembagaan)

Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif - inisiatif strategi.

Strategi yang dijalankan pada sektor pemerintahan dapat dilihat upaya dari pemerintah dalam membuat strategi agar dapat tercapainya tujuan dimasa depan dengan menganalisis situasi dan kondisi dimasa sekarang dan masa depan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah membuat perbedaan pengelolaan dengan sektor privat. Perbedaan ini terutama disebabkan adanya perbedaan karakteristik.

Menurut Paul (2015) perencanaan strategis disektor publik tidak dilihat sebagai hanya alat analisis untuk kerangka perumusan strategi tetapi juga mencakup kegiatan lain yang perlu dipandang untuk mencapai efektivitasnya.

Namun menurut Berry dan Wechsler (Paul, 2015) perencanaan strategis didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk mengelola lembaga yang arah masa depan dalam kaitannya dengan lingkungan dan tuntutan pemangku kepentingan eksternal, termasuk perumusan strategi, analisis kekuatan dan kelemahan, identifikasi pemangku kepentingan lembaga, pelaksanaan tindakan dan masalah manajemen.

Menurut Wechsler dan Backoff (Aime dan Sebastian 2010) dalam penerapan strategi organisasi sektor publik dalam prosesnya melalui upaya merumuskan baik faktor-faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap strategi dari organisasi publik dan menyusun suatu paparan yang lebih aplikatif dan lebih efisien.

B. Pemerintahan Daerah.

Secara etimologi pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Artinya sebuah ucapan yang maksudnya menyuruh melakukan sesuatu, Pemerintah yaitu memerintah dalam sesuatu negara atau badan yang tertinggi yang memerintah dalam negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah). Pemerintah juga merupakan perbuatan (cara, hal, urusan) (Purwadinata, 2017:46).

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana yang dimaksud dalam UUD Negara republik Indonesia tahun 1945. Dimana gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah (Prabowo, 2017:17).

Menurut Ni'matul Huda pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Putra, 2015:21). Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dalam pasal 2 menjelaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal berikut, yakni pasal 3 mempertegas penjelasan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala Daerah mempunyai dua fungsi, yaitu:

- a. Sebagai kepala daerah otonom, yang memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
- b. Sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintahan pusat (Prabowo, 2017:20).

1. Fungsi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki fungsi yang dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2014 adalah :

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi secara luas, akan tetapi di kecualikan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahannya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Berdasarkan yang disebutkan diatas menurut (Fadli, 2016:1773) bahwa fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang dimana menjalankan, mengatur, dan

menyelenggarakan jalannya pemerintahan seperti yang dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014

2. Asas-asas pemerintahan daerah

Asas penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia dapat di jelaskan sebagai berikut menurut Setiawan, Irfan. (2014) bahwa:

- a. Asas desentralisasi adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat ke daerah otonom berdasarkan otonomi.
- b. Asas dekonsentrasi adalah pendelegasian wewenang pusat ke daerah.
- c. Asas tugas pembantuan adalah system dan prosedur penugasan pemerintah kepala daerah/desa, provinsi kepada kabupaten/kota/desa, dan pemerintah kabupaten/kota kepada desa.

D. Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan adalah sebuah proses berkelanjutan yang mengupayakan transfer kekuasaan yang didasari *penguatan modal social* (Kepercayaan (*trusts*), Patuh Aturan (*role*), dan Jaringan (*networking*)), disambut partisipasi dan komunikasi aktif dengan metode bottom-up yang dilandasi sikap saling percaya dari masyarakat untuk mengubah dan menentukan nasibnya untuk pencapaian suatu tujuan tertentu (kesejahteraan ekonomi).

Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003). Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2009).

Pada Pemberdayaan pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat

dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya (Soetomo, 2006).

1. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam perkembangannya konsep mengenai strategi terus berkembang. Strategi adalah cara untuk mengarahkan tenaga, dana, daya, dan peralatan yang dimiliki guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Arti pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas (independent) dan mandiri (Sumaryo, 1991).

Hikmat (2001:12) menjelaskan ada beberapa faktor internal yang menghambat pemberdayaan antara lain, kurang bisa untuk saling mempercayai, kurang daya inovasi atau kreativitas, mudah pasrah atau menyerah atau putus asa, aspirasi dan cita-cita rendah, tidak mampu menunda menikmati hasil kerja, wawasan waktu yang sempit, familisme, sangat tergantung pada bantuan pemerintah, sangat terikat pada tempat kediamannya dan tidak mampu atau tidak bersedia menempatkan diri sebagai orang lain.

Bagaimana memberdayakan masyarakat merupakan suatu masalah tersendiri yang berkaitan dengan hakikat dari power atau daya (mengandung pengertian "kemampuan", "kekuatan" ataupun "kekuasaan") serta hubungan antar individu atau lapisan sosial yang lain.

Strategi pemberdayaan masyarakat adalah cara untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan masyarakat adalah

penekanan pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri.

2. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang berkelanjutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif baru dalam pembangunan masyarakat.

Menurut Sumaryadi (2005 : 11) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

Menurut Suharto (2005 : 60) pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai sebuah proses dan tujuan. Maksudnya: a) Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan. b) Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ke arah yang lebih sejahtera.

World Bank 2001 dalam Totok dan Poerwoko (2012: 27) mengartikan pemberdayaan yaitu :

Upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Menurut Chatarina Rusmiyati (2011: 16) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Sedangkan menurut Ambar Teguh (2004 : 77) pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya.

Pemberdayaan menurut Suparjan dan Hempri (2003: 43), mengatakan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya mencakup dua arti yaitu *to give or authority* dan *to give to or enable*. Dalam pengertian pertama, pemberdayaan memiliki makna memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, pemberdayaan diartikan dalam sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Menurut Fahrudin, (2012 : 96 – 97) Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya, seperti: Enabling, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat

berkembang. Empowering, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Protecting, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan.

Konsep pemberdayaan menurut Sunit Agus T (2008: 9) berkaitan dengan dua istilah yang saling bertentangan, yaitu konsep berdaya dan tidak berdaya terutama bila dikaitkan dengan kemampuan mengakses dan menguasai potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek pembangunan, hakikat pembangunan nasional menurut Onny. S. Prijono (1996: 97) adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seutuhnya, dengan kata lain memberdayakan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan. Di samping itu, juga mengandung arti melindungi dan membela dengan berpihak pada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah, menurut Sudjana (2001: 256) pentingnya pembangunan masyarakat yang menitikberatkan sektor ekonomi ialah agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pertumbuhan sektor ini, tanpa mengabaikan peranan sektor-sektor lainnya, dan sekaligus dapat menurunkan tingkat kemiskinan penduduk.

Disimpulkan bahwa konsep dasar pemberdayaan pada dasarnya yaitu upaya suatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki dalam rangka tujuan hidup yang lebih sejahtera. Pemberdayaan yang di inginkan oleh masyarakat adalah pemberdayaan yang bisa membangun masyarakat ke arah lebih sesuai dengan tujuan pemberdayaan, menurut Sunyoto Usman (2010: 31), usaha memberdayakan

masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yang semakin kompleks, pembangunan pedesaan dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi pertanian. Pembangunan pedesaan juga tidak hanya cukup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar. Lebih dari itu adalah sebuah upaya dengan spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai kebutuhan sehingga masyarakat dapat mandiri, percaya diri, dan tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara.

Dalam pemberdayaan perlu dipikirkan siapa saja yang akan menjadi sasaran pemberdayaan. Sasaran pemberdayaan yang dimaksud yaitu siapa yang akan menjadi kelompok atau masyarakat yang akan diberdayakan, menurut Schumacer dalam Ambar Teguh S. (2004:90), memiliki pandangan pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin dengan tidak harus menghilangkan ketimpangan struktural terlebih dahulu. Masyarakat miskin sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun. Disamping itu NGO (*Non-Governmental Organization*) merupakan agen yang memiliki posisi penting, karena dipandang lebih bersifat wiraswasta, berpengalaman dan lebih inovatif dibanding pemerintah. Pemaknaan pemberdayaan selanjutnya seiring dengan konsep *good governance*. Konsep ini mengetengahkan tiga pilar yang harus dipertemukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat yang hendaknya menjalin kemitraan yang selaras.

Pemberdayaan sendiri memiliki prinsip-prinsip dalam prosesnya, prinsip pemberdayaan menurut Mathews dalam Totok dan Poerwoko (2012:105) menyatakan bahwa : "*Prinsip adalah suatu pernyataan tentang Kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten*". Karena

itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Meskipun prinsip biasanya diterapkan dalam dunia akademis, Leagans dalam Totok dan Poerwoko (2012:105) menilai bahwa setiap penyuluh/fasilitator dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan.

Prinsip pemberdayaan menurut Sunit Agus Tri Cahyono (2008:14) mengemukakan prinsip-prinsip pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan yang dilaksanakan harus bersifat lokal
- b. Lebih mengutamakan aksi sosial
- c. Menggunakan pendekatan organisasi komunitas atau kemasyarakatan lokal
- d. Adanya kesamaan kedudukan dalam hubungan kerja
- e. Menggunakan pendekatan partisipatif, para anggota kelompok sebagai subjek bukan objek
- f. Usaha kesejahteraan sosial untuk keadilan

Prinsip pemberdayaan masyarakat didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku di masyarakat tersebut, dilandasi oleh nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat tersebut dan harus mampu menggerakkan pasrtisipasi masyarakat agar lebih berdaya.

Pemberdayaan masyarakat dibutuhkan tahap pemberdayaan yang jelas dan terarah, disebutkan tahap-tahap pemberdayaan menurut Suparjan & Hempri S (2003:44) dalam rangka pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:

- a) Meningkatkan kesadaran kritis atau posisi masyarakat dalam struktur sosial politik.

Hal ini berangkat dari asumsi bahwa sumber kemiskinan berasal dari konstruksi sosial yang ada pada masyarakat itu sendiri.

- b) Kesadaran kritis yang muncul diharapkan membuat masyarakat mampu membuat argumentasi terhadap berbagai macam eksploitasi serta sekaligus membuat keputusan terhadap hal tersebut.
- c) Peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam konteks ini perlu dipahami, bahwa masalah kemiskinan bukan sekedar persoalan kesejahteraan sosial tetapi berkaitan dengan faktor politik, ekonomi sosial budaya dan keamanan.
- d) Pemberdayaan juga perlu meningkatkan dengan pembangunan sosial budaya masyarakat.

Sedangkan Menurut Ambar Teguh S (2004 : 83), bahwa pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jauh. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri.

Sebagaimana disampaikan diatas dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Menurut Ambar Teguh S (2004: 83), tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi :

1. Tahap penyadaran dan pembentukan prilaku menuju prilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada kemandirian.

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan prilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdaya/aktor/pelaku pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektifnya untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat akan kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Penyadaran masyarakat ini akan bertumbuh, kemudian merangsang semangat kebangkitan mereka untuk meningkatkan kemampuan diri dan lingkungan. Dengan adanya semangat tersebut diharapkan akan dapat menghantarkan masyarakat untuk sampai pada kesadaran dan kemauan untuk belajar. Dengan demikian masyarakat semakin terbuka dan merasa membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk memperbaiki kondisi.

Pada tahap kedua yaitu proses transformasi pengetahuan dan kecakapan, keterampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif, jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan, keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.

Tahap ketiga adalah merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan, kerterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat dalam kondisi seperti ini seringkali didudukkan sebagai subjek pembangunan atau pemeran utama. Pemerintah menjadi fasilitatornya.

Dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan aspek-aspek untuk memberdayakan masyarakat, aspek yang diperlukan dalam memberdayakan masyarakat menurut Suparjan & Hempri (2003: 49), yang perlu menjadi inti dasar pemberdayaan yaitu Klarifikasi, pengakuan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang cukup agar mampu berperan di dalam perubahan sosial yang semakin cepat di masa depan.

Dapat ditarik kesimpulan, pengertian pemberdayaan masyarakat adalah proses pemberian daya atau kekuatan (*power*) terhadap perilaku dan potensi individu atau masyarakat, serta pengorganisasian kelompok masyarakat oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri atas dasar partisipasi. Pemberdayaan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memiliki inisiatif untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di sekitarnya agar dapat memperbaiki atau meningkatkan kualitas serta kondisi diri sendiri menjadi lebih baik. Pemberdayaan memiliki tujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dan dapat memperbaiki segala aspek, dalam arti memiliki potensi agar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar baik pemerintah maupun non pemerintah.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, dan pendidikan. Berikut ini merupakan program-program pemberdayaan masyarakat:

1. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pemerintahan Desa.

Pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan desa mencakup semua sumber daya yang ada di pemerintahan desa seperti kepala desa, perangkat desa dan BPD. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, musyawarah dalam penyusunan program-program desa, koordinasi dalam pelaksanaan program-program desa, dan peningkatan kualitas kinerja di pemerintahan desa. Dengan adanya program pemberdayaan ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja di pemerintahan desa dalam membangun serta memajukan desa.

2. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kelembagaan

Program pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan mencakup semua lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Program ini bertujuan untuk membangun lembaga yang lebih terarah, produktif, dan terorganisir. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, penyelenggaraan kegiatan, dan peningkatan sarana/prasarana. Dengan adanya program pemberdayaan di bidang kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga agar dapat membantu pemerintah desa dalam menjalankan roda pembangunan.

3. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Ekonomi

Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini mencakup pemberdayaan UKM,

industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, workshop, pemodalan/permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana/prasarana dan lain-lain. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

4. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Teknologi.

Program pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi merupakan program pemerintah desa dalam mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan kinerja agar lebih cepat dan akurat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, pengembangan teknologi, dan penggunaan teknologi dalam proses kerja dan kehidupan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi diharapkan dapat meningkatkan daya saing masyarakat, memudahkan masyarakat dalam bekerja, serta memudahkan masyarakat untuk berbagi dan mendapatkan informasi.

5. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan

Program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan merupakan program pemerintah desa dalam meningkatkan pendidikan masyarakat agar lebih berkualitas dan kompeten. Sasaran dari pemberdayaan ini tidak hanya ditujukan kepada para pelajar saja, namun juga kepada para pengajar maupun lembaga pendidikan lainnya. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan guru, peningkatan sarana dan prasarana, bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, beasiswa untuk siswa yang berprestasi, dan lain-lain. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan pendidikan masyarakat serta menciptakan masyarakat yang berkualitas dan kompeten.

6. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pendidikan

Program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan merupakan program pemerintah desa dalam meningkatkan pendidikan masyarakat agar lebih berkualitas dan kompeten. Sasaran dari pemberdayaan ini tidak hanya ditujukan kepada para pelajar saja, namun juga kepada para pengajar maupun lembaga pendidikan lainnya. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan guru, peningkatan sarana dan prasarana, bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, beasiswa untuk siswa yang berprestasi, dan lain-lain. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan pendidikan masyarakat serta menciptakan masyarakat yang berkualitas dan kompeten.

4. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Menurut Mardikanto (2014:202), ada 6 tujuan pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu:

a. Perbaikan kelembagaan (better institution)

Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

b. Perbaikan usaha (better business)

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

c. Perbaikan pendapatan (better income)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

d. Perbaikan lingkungan (better environment)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

e. Perbaiki kehidupan (better living)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

f. Perbaiki masyarakat (better community)

Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

E. Kerangka Pikir

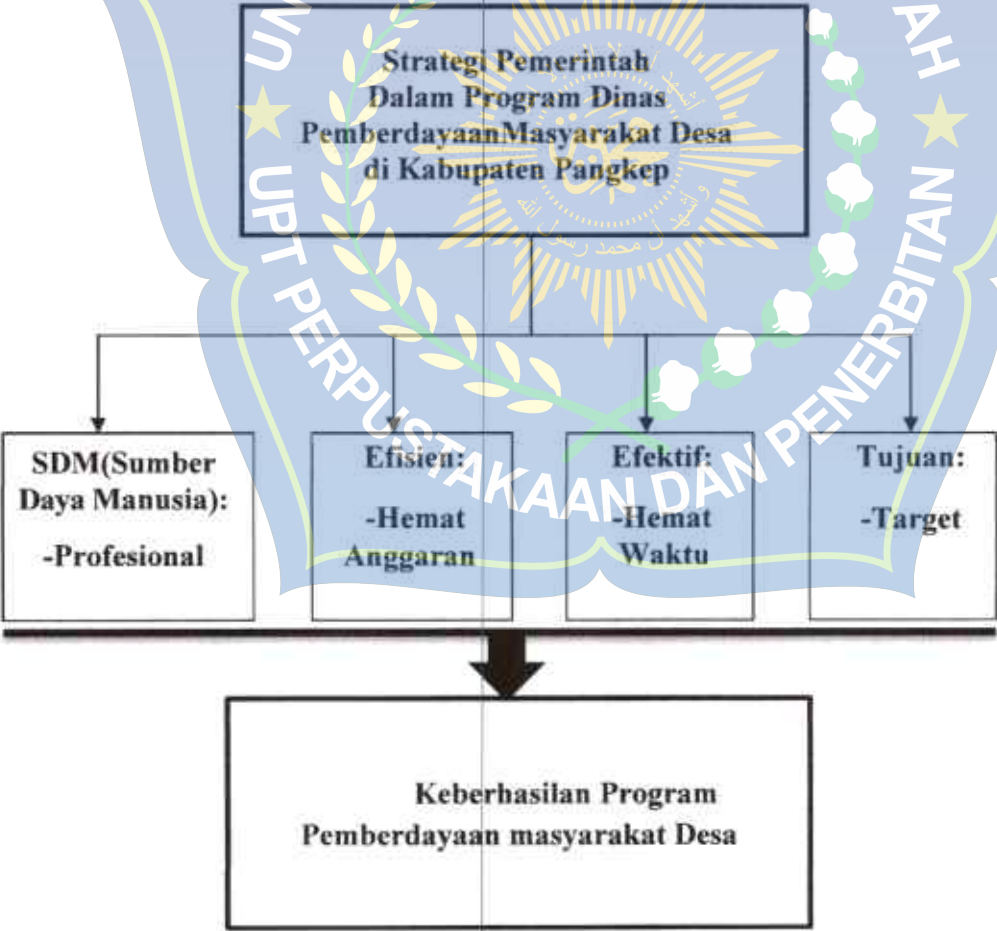


Table 1.1

F. Fokus Penelitian

Peneliti dalam hal ini ingin melihat seperti apa strategi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pangkep dalam memberdayakan desa, dalam mengukur strategi pemerintah sebagai bentuk pelayanan publik sesuai kerangka pikir di atas melalui tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu Program Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Usaha Ekonomi.

G. Deskripsi Focus Penelitian

1. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan asset organisasi yang sangat vital, karena itu peran dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lainnya. Sumber daya manusia dalam pemberdayaan masyarakat Desa, memiliki peranan yang sangat penting dimana dalam segala bentuk kegiatan maupun aktivitas yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan ini harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan program ini.

2. Efisien

Efisien merupakan aktivitas untuk meminimalisir kerugian atau pemborosan sumber daya dalam menghasilkan/ melaksanakan sesuatu atau sejauh mana waktu, tenaga, atau biaya yang digunakan untuk melakukan sesuatu kegiatan. pemberdayaan masyarakat baik itu dalam bidang ekonomi, pendidikan, kreatifitas dan lain sebagainya, dapat dikatakan efisien apabila sudah sesuai dengan hal tersebut yaitu hemat biaya atau anggaran.

3. Efektif

Efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil atau target yang diharapkan dengan waktu yang telah ditetapkan terlebih dahulu tanpa memperdulikan

biaya yang harus atau sudah dikeluarkan. Suatu pekerjaan dalam pemberdayaan masyarakat desa dapat dikatakan efektif jika tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya berhasil dicapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

4. Tujuan

Tujuan dalam pemberdayaan masyarakat Desa yang dimaksud disini adalah dalam setiap kegiatan ataupun program harus ada target yang telah ditetapkan untuk dicapai, begitupun dengan program pemberdayaan desa ini yang memiliki target untuk mensejahterakan masyarakat desa melalui beberapa macam upaya pemberdayaan di beberapa bidang termasuk ekonomi, social, budaya dan kreatifitas masyarakat yang berada dipedesaan melalui bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan yang telah dirancang



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pangkep. Tempat lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan memudahkan peneliti memperoleh data penelitian, baik bersifat data primer maupun data sekunder serta adanya pertimbangan waktu dan biaya.

Waktu penelitian dilakukan berdasarkan lama waktu kegiatan penelitian yang membutuhkan waktu kurang lebih 1 (satu) bulan persiapan, 1 bulan persiapan pengumpulan data dan pembuatan hasil penelitian dan 1 bulan proses kegiatan penyelesaian studi. Jumlah waktu yang digunakan selama 3 (tiga) bulan yaitu diperkirakan bulan Maret sampai April 2021.

B. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, yang menggambarkan sejumlah variabel yang diteliti tanpa melakukan pengujian jalinan (hubungan) antar variabel yang diteliti.

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskripsi dalam bentuk survey. Metode ini menekankan lebih pada penentuan informasi tentang variabel daripada informasi tentang individu dan bermaksud mengumpulkan data yang relatif terbatas.

C. Informan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer berdasarkan pengamatan langsung dan wawancara dengan pegawai Pada

Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pangkep yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Bidang Pembangunan dan Masyarakat Desa, Kepala Seksi Usaha Ekonomi Desa Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketua Bumdes Desa Pitue. Jenis pertanyaan adalah pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup.

D. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Metode pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode ini dipergunakan sebagai salah satu piranti dalam pengumpulan data berdasarkan pengamatan secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah dialog secara langsung untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang diperoleh melalui pencatatan-pencatatan dari dokumen-dokumen yang terdapat pada lokasi penelitian.

Jenis data penelitian ini terdiri dari data kualitatif adalah data tentang keterangan-keterangan yang menjelaskan berbagai fakta atau kejadian yang dapat dijelaskan secara rinci.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui hasil penelitian langsung terhadap obyek yang diteliti. Data tersebut diperoleh melalui metode observasi dan hasil kuesioner.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain dari dokumentasi/tulisan (karya ilmiah dan hasil penelitian) dan dari informasi pihak-pihak yang berkaitan dengan kajian yang diteliti (uraian tugas, tata kerja dan referensi lainnya).

E. Teknik Analisa Data

Menurut Lexy J. Moleong (2002: 103) bahwa analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik analisis data merupakan teknik dalam memeriksa dan menganalisis data sehingga menghasilkan data yang sah dan dapat dipercaya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif. Menurut MB. Miles dan AM. Huberman sebagaimana dikutip oleh HB. Sutopo (2002: 94) "Analisis dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen", yaitu :

1. Pengumpulan data

Proses analisis data dimulai dengan mengumpulkan data. Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang dikemukakan sebelumnya, maka pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Seluruh data yang terkumpul dibaca, dipelajari, ditelaah. Pengumpulan data dilakukan selama data yang diperlukan belum memenuhi dan akan dihentikan jika data sudah memenuhi untuk ditarik suatu kesimpulan.

2. Reduksi data

Langkah selanjutnya setelah pengumpulan data adalah mengadakan reduksi data. Kegiatan reduksi data berlangsung selama penelitian dilaksanakan, dengan cara membuang data yang tidak diperlukan, mengatur data dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga agar tetap berada di dalamnya sehingga penarikan kesimpulan akhir dari penelitian dapat dilakukan dengan mudah.

3. Penyajian data

Proses analisis selanjutnya adalah penyajian data, yaitu mengorganisir informasi secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam menghubungkan dan merangkai keterkaitan antar data dalam menyusun penggambaran proses serta memahami fenomena yang ada pada obyek penelitian.

4. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Data yang diperoleh di lapangan, sejak awal peneliti sudah menarik kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula masih belum jelas dan masih bersifat sementara, tetapi kemudian meningkat sampai pada kesimpulan yang mantap yaitu pernyataan yang telah memiliki landasan yang kuat dari proses analisis data yang dilaksanakan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dapat segera ditarik kesimpulan yang bersifat sementara. Agar kesimpulan dapat lebih mantap maka peneliti memperpanjang waktu observasi tersebut sampai ditemukan data baru yang dapat mengubah kesimpulan sementara sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang baik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Secara geografis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada pada 11.00' bujur timur, dan 040. 40' – 080. 00' lintang selatan. Secara Administratif Luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 12.362,73 Km² (setelah diadakan analisis Bakosurtanal) untuk wilayah laut seluas 11.464,44 Km², dengan daratan seluas 898,29 Km², dan panjang garis pantai di Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan yaitu 250 Km, yang membentang dari barat ke timur. Di mana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 kecamatan, di mana 9 kecamatan terletak pada wilayah daratan, dan 4 kecamatan terletak di wilayah kepulauan.

Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan merupakan kabupaten yang struktur wilayah terdiri atas 2 bagian utama yang membentuk kabupaten ini yaitu:

1. Wilayah Daratan Secara garis besar wilayah daratan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan ditandai dengan bentang alam wilayah dari daerah dataran rendah sampai pegunungan, di mana potensi cukup besar juga terdapat pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan yaitu ditandai dengan terdapatnya sumber daya alam berupa hasil tambang, seperti batu bara, marmer, dan semen. Disamping itu potensi pariwisata alam yang mampu menambah pendapatan daerah. Kecamatan yang terletak pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu terdiri dari : Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri, Kecamatan Minasa Te'ne, Kecamatan Tondong Tallasa, dan Kecamatan Mandalle.

2. Wilayah Kepulauan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan merupakan wilayah yang memiliki kompleksitas wilayah yang sangat urgen untuk dibahas, wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan memiliki potensi wilayah yang sangat besar untuk dikembangkan secara lebih optimal, untuk mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan. Kecamatan yang terletak di wilayah Kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu: Kecamatan Liukang Tupabiring, Kecamatan Liukang Tupabiring Utara, Kecamatan Liukang Kalmas, Kecamatan Liukang Tangaya.

B. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pangkep

1. Gambaran Umum

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

- Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.

3. Pelaksanaan teknis pembinaan umum dan koordinasi di Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
4. Pelaksanaan teknis pemetaan urusan pemerintahan desa, desa adat dan pemberdayaan masyarakat.
5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
6. Pelaksanaan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
7. Pelaksanaan administrasi Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
8. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Pangkajene dan Kepulauan.

- **Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan rencana kegiatan
2. Pengelolaan urusan umum, administrasi kepegawaian dan hukum
3. Pengelolaan administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan
4. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana
5. Mengkoordinasikan kerjasama dengan instansi terkait
6. Pembinaan pelayanan administrasi dan ketatalaksanaan, ketatausahaan dan

perlengkapan dan rumah tangga

7. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program dan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat terdiri dari :

⇒ Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Kepala Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
- d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas.
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- f. Menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran.
- g. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran.
- h. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana kerja anggaran.
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan.

- j. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan.
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

⇒ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan.
- d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas.
- e. Melakukan administrasi dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar.
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan.
- g. Membuat laporan hasil kegiatan

- Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemerintahan Desa, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan, menyusun rencana, menyelenggarakan pembinaan,

monitoring dan evaluasi di Bidang Pemerintahan Desa. Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan di Bidang Pemerintahan Desa.
- b. Penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria di Bidang Pemerintahan Desa.
- c. Melakukan bimbingan teknis dan supervise di Bidang Pemerintahan Desa.
- d. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keuangan dan aset desa.
- e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan Desa dan memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai 3 (tiga) seksi yaitu :

1. Seksi Tata Pemerintahan dan Penataan Desa dan Kelurahan

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas menyusun program dan menyiapkan bahan untuk pembinaan, pengawasan, supervise, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan Desa dan Kelurahan, seksi ini mempunyai fungsi yaitu :

- a. Menyiapkan bahan rencana kegiatan Seksi tata pemerintahan dan Penataan Desa dan Kelurahan.
- b. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas.
- c. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa dan badan permusyawaratan desa.
- d. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan desa, tata kerja desa, desa adat, tata wilayah desa dan batas desa.
- e. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supevisi, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2. Seksi Administrasi Pemerintahan Desa

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa yang mempunyai fungsi yaitu :

- a. Merencanakan kegiatan seksi Administrasi Pemerintahan Desa sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan tugas.
- b. Melakukan pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
- c. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.
- e. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.
- f. Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelantikan kepala desa anggota badan permusyawaratan desa dan pejabat kepala desa.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Seksi Keuangan dan Aset Desa

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas menyusun program dan menyiapkan bahan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa dan Sistem Informasi Keuangan Desa dan mempunyai fungsi:

- a. Merencanakan kegiatan seksi Keuangan dan Aset Desa sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan tugas.

- b. Melakukan koordinasi, fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan, supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan, Pengelolaan Keuangan Desa.
- c. Melakukan Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Desa.
- d. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kebijakan, menyusun rencana pembinaan/pengembangan kegiatan Usaha Ekonomi Desa, Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, Pendayagunaan sumber daya Alam dan Teknologi Perdesaan.

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan tugas.
- b. Melakukan Penyusunan Norma Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- c. Melakukan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- d. Melakukan Bimbingan Teknis dan Supervisi di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Melakukan koordinasi, fasilitasi, Pembinaan Pengawasan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Perdesaan.

- f. Melakukan Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai 3 (tiga) seksi yaitu :

1. Seksi Usaha Ekonomi desa

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melakukan analisa dan menyusun program serta mempersiapkan bahan bimbingan teknis dan melaksanakan pembinaan.

Kepala Seksi Usaha Ekonomi Desa mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Usaha Ekonomi Desa sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dan belum dilaksanakan staf seksi Usaha Ekonomi Desa, pelaksanaan pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
- d. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan hasil dan pemasaran usaha BUMDesa.
- e. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan permodalan ekonomi desa.
- f. Melakukan koordinasi fasilitasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembentukan dan kelembagaan pasar desa dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melakukan analisa dan menyusun program serta mempersiapkan bahan bimbingan teknis dan melaksanakan pembinaan. Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dan belum dilaksanakan staf seksi pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat.
- d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan.
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- g. Melakukan Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan dan swadaya masyarakat desa dan kelurahan.
- h. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif.
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat kepada atasan sebagai bahan pertanggung jawaban.
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan Kelembagaan dan social budaya masyarakat serta memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

- k. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Perdesaan

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melakukan analisa dan menyusun program serta mempersiapkan bahan bimbingan teknis dan melaksanakan pembinaan terhadap pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Perdesaan.

Kepada Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Perdesaan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Perdesaan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dan belum dilaksanakan staf seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Perdesaan.
- d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan.
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendayagunaan sumber daya alam.
- g. Melakukan Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Inovasi dan Promosi teknologi perdesaan.
- h. Melakukan Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, monitoring evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pemanfaatan dan pengembangan

teknologi perdesaan.

- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pendayagunaan Sumber daya Alam dan Teknologi Perdesaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
- j. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugasnya untuk mendukung pelaksanaan tugas, dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

- **Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan**

Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan penetapan dan melaksanakan kebijakan, menyusun rencana, menyelenggarakan, membina, memfasilitasi, mengawasi, memberikan rekomendasi perizinan dan evaluasi di Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Kepada Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan tugas.
- b. Melakukan Persiapan Penyusunan norma, standard, prosedur, dan criteria di bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- c. Melakukan Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- d. Melakukan bimbingan teknis dan supervise di bidang pembangunan kawasan perdesaan.
- e. Melakukan, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Sarana dan Prasarana Desa.
- f. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kawasan ekonomi perdesaan.
- g. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasa, supervise,

monitoring, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan, pengembangan kawasan ekonomi perdesaan.

- h. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- i. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan kewenangan di bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pembangunan Kawasan Ekonomi Perdesaan mempunyai 3 (tiga) seksi yaitu :

1. Seksi Sarana dan Prasarana Desa

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam menyiapkan bahan perumusan dan penetapan, menyusun program dan rencana, menyelenggarakan, membina, mengawasi, memfasilitasi, menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan, di bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Desa mempunyai fungsi:

- a. Melakukan Kegiatan Seksi sarana prasarana desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugasnya.
 - b. Melakukan pemantauan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
 - c. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sarana dan prasarana pemukiman desa.
 - d. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan transportasi desa.
 - e. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan elektrifikasi desa.
 - f. Melaksanakan tugas fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Seksi Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam menyiapkan bahan perumusan dan penetapan, menyusun program dan rencana, menyelenggarakan, membina, mengawasi, memfasilitasi, menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu.

Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan Kegiatan Seksi Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu Sebagai Pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Melakukan Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kawasan ekonomi terpadu.
- c. Melakukan Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan pusat pertumbuhan kawasan ekonomi terpadu.
- d. Melakukan Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan permodalan dan investasi kawasan ekonomi terpadu.
- e. Melakukan Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengembangan fasilitasi usaha dan pemasaran kawasan ekonomi terpadu.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam menyiapkan bahan perumusan dan penetapan, menyusun program dan rencana, menyelenggarakan, membina, mengawasi, memfasilitasi, menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan Kawasan Perdesaan.

Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan perumusan penetapan kebijakan penyelenggaraan pengembangan Kawasan Perdesaan.
- b. Melakukan Pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
- c. Membuat konsep, mengeroksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan.
- d. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.
- e. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.
- f. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana kawasan perdesaan.
- g. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan.
- h. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama dan pengembangan kapasitas

b. Sumber Daya Organisasi

Untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasional serta kelancaran tugas dan fungsi organisasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan didukung oleh sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia (pegawai) serta sarana dan prasarana.

Total jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 sebanyak 28 orang. Berdasarkan jenjang eselon terdiri dari 1 orang Kepala Dinas (Eselon II), 4 orang eselon III terdiri dari 1 orang Sekretaris dan 3 orang Kepala Bidang, 11 orang

eselon IV terdiri dari 2 orang Kepala Sub Bagian dan 9 orang Kepala Seksi. Sedangkan untuk jabatan Fungsional Umum (staf) sebanyak 12 orang.

Berdasarkan jenjang pendidikan terdiri dari Megister Manajemen (S2) 4 orang, Sarjana (S1) 16 orang, Diploma (D3) 1 orang dan SMA 4 orang. Sedangkan berdasarkan Jenis Kelamin Laki-laki berjumlah 16 orang dan Perempuan berjumlah 12 orang.

Komposisi pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan jenjang eselon, tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel

Berdasarkan Jenjang Eselon, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Pada DPMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Jenjang Eselon :		
	Struktural		
	- Eselon II	1	
	- Eselon III	4	
	- Eselon IV	11	
	Fungsional Umum (Staf)	12	
	Jumlah	28	
2	Tingkat Pendidikan		
	- Doktor (S3)	-	
	- Master (S2)	4	
	- Sarjana (S1)	19	
	- D3	1	
	- SMA	4	
	- SMP	-	
	Jumlah	28	
3	Jenis Kelamin		
	- Laki-laki	16	
	- Perempuan	12	

	Jumlah	28	
--	---------------	-----------	--

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga didukung oleh sarana dan prasarana yang terdiri dari 1 unit bangunan gedung kantor yang terdiri dari 7 ruang, 13 unit kendaraan roda dua. Selain sarana dan prasarana tersebut di atas, aktivitas dan kinerja pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangkajene juga didukung oleh peralatan kantor dan rumah tangga seperti meja kerja, meja rapat, kursi, filling kabinet, lemari, komputer, laptop, akses internet, AC dan sebagainya.

C. Strategi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Pangkep.

Strategi pemberdayaan masyarakat diatur pada Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1)

Strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan dengan upaya pemberdayaan dalam kaitannya dengan sosial ekonomi dengan memberikan berbagai upaya seperti menerapkan skill yang dimiliki oleh masyarakat dan mengadakan peningkatan sumber daya manusia, mengembangkan potensi yang ada dalam meningkatkan ekonomi.

1. Sumber Daya Masyarakat

Sumber daya masyarakat merupakan komponen penting dalam tercapainya sebuah strategi yang dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep, sumber daya masyarakat merupakan paktor utama dalam berjalanya program pemberdayaan

masyarakat desa ini. seperti dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pangkep (Drs. Abd. Haris Has, AP) terkait strategi antara pemerintah dengan berbagai pihak adalah sebagai berikut :

“dalam program pemberdayaan masyarakat desa, termasuk dalam peningkatan skil masyarakat, kami menggunakan sumber daya ahli dibidangnya untuk mempermudah dalam melakukan pembinaan dan pelatihan, pemerintah mempekerjakan tenaga profesional untuk melatih masyarakat”, terangnya.

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa sumber daya manusia yang dipakai dalam membimbing dan membina masyarakat desa serta memberikan pelatihan adalah mereka yang memiliki kemampuan dibidangnya masing-masing.

Adapun Kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Pangkep berdasarkan wawancara Kepala Seksi Usaha Ekonomi Desa Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Maya Nurbaya, SE) sebagai berikut :

- “- Melakukan Pelatihan dan Pembinaan pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
- Melakukan Pelatihan dan Pembinaan UMKM
- Melakukan Pelatihan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- Melakukan Pelatihan dan Pembinaan PKK”

Tujuan Pelatihan ini untuk Memahami cara memetakan aset desa serta strategi pengembangannya untuk mencapai desa mandiri, Memahami cara menginisiasi, mendirikan, menentukan jenis usaha, dan mengembangkan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai lembaga usaha milik desa yang mampu mengoptimalkan potensi sekaligus menjawab kebutuhan desa, Memahami manajemen organisasi BUMDesa dan cara pengelolaannya dengan melakukan interaksi langsung dengan pelaku BUMDesa di desa yang telah menapak keberhasilan menjalankan

BUMDesa-nya, Mampu merancang disain strategi pengembangan BUMDesa untuk desanya sendiri.

Manfaat Pelatihan ini Memberikan pengenalan perencanaan desa berbasis aset dan potensi yang mampu menggerakkan pembangunan desa, Memberikan pemahaman mengenai prosedur pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang partisipatif, inovatif, edukatif, transparan, dan akuntabel, Memberikan daya kreativitas wirausaha dalam mengembangkan BUMDES dan UMKM di desa, Mengenalkan keragaman usaha BUMDesa yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan desa. Setiap desa pasti memiliki potensi untuk dikembangkan. Bahkan masalahnya, banyak warga desa tidak menyadari besarnya potensi yang dimiliki desanya. Pada titik inilah BUMDesa lahir dan mengembangkan dirinya sebagai lembaga usaha, berbasis potensi asli desa yang bakal memastikan seluruh warga desa bakal mendapatkan manfaatnya.

2. efisien

Efisien adalah sebuah usaha untuk meminimalisir kerugian atau pemborosan sumber daya dalam menghasilkan atau melaksanakan sesuatu atau sejauh mana waktu, tenaga, atau biaya yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan. Efisien merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara cepat dan tepat yang mendapatkan suatu hasil yang diinginkan dengan tepat waktu tanpa membuang-buang waktu, biaya dan juga tenaga dalam menjalankan sebuah kegiatan pemberdayaan ini. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Pangkep Desa Pitue berdasarkan hasil wawancara Ketua BUMDES (Muhammad Nasrun, S.Sos) sebagai berikut:

“Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang telah diprogramkan pemerintah pada Desa Pitue telah sesuai dengan peraturan Bupati tentang anggaran pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDES minimal 100 juta, sehingga membuka akses dan memotivasi masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi desa.”

“selain dari pada anggaran yang tergolong hemat tersebut, bisa bilang program pengembangan masyarakat desa yang dilakukan dengan anggaran BUMDES ini juga menghemat tenaga karna kegiatannya dilakukan di tiap-tiap desa sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk waktunya terlalu banyak terbuang akibat akses yang begitu jauh andaikan dilakukan berpusat di kota”, tambahnya.

Hasil wawancara diatas menghasilkan kesimpulan yang dibuat oleh penulis bahwa tingkat efisiennya kegiatan ini tergolong cukup baik apalagi dalam hal penghematan anggaran, tenaga dan juga waktu luang untuk masyarakat tetap melakukan aktivitasnya yang lain karna kegiatannya dilakukan oleh pihak BUMDES sehingga lokasinya berpusat di tiap-tiap desa.

3. efektifitas

Efektif adalah dapat mencapai tujuan maksimal seperti yang diharapkan. Efektif dapat dijabarkan sebagai suatu pekerjaan yang bisa atau mampu diselesaikan dengan tepat waktu, sasaran dan biaya yang sesuai seperti rencana yang sebelumnya telah ditetapkan dengan kata lain sesuai target yang telah ditentukan. Efektif berarti mendapatkan hasil, manjur/mujarab. Efektif dapat dilakukan dengan melakukan sesuatu tepat waktu.

. Hasil wawancara dari staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Drs. Abd. Haris Has, AP) sebagai berikut:

“untuk mengetahui bahwa apakah program ini tergolong efektif atau tidak adalah bagaimana kita bisa melihat dan membandingkan kehidupan masyarakat desa saat ini setelah dilaksanakanya program pengembangan masyarakat desa ini dengan kehidupan sebelum dilakukanya program pemberdayaan ini. Saya rasa kegiatan ini sangat efektif karna mampu memberikan dampak positif terhadap kehidupan

ekonomi masyarakat desa”, tegasnya.

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa strategi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat desa terutama pada bidang ekonomi sangat berpengaruh dalam penghasilan pada masyarakat sehingga program ini dapat kita katakana cukup efektif karna memberikan dampak positif serta masyarakat sangat antusias menerima program-program yang diberikan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pangkep.

4. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan. Tujuan berarti yang akan dituju, yang dimaksudkan, yang berarti juga tuntutan atau yang dituntut.

“sebenarnya tujuan utama dalam program ini adalah bagaimana kita dapat menciptakan masyarakat desa yang mandiri, memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya, mencegah terjadinya keterbelakangan dalam hal pendidikan dan juga ekonomi, itulah tujuan utama dari program ini dan kami rasa apa yang menjadi tujuan serta target pelaksanaan sudah bisa dikatakan 70% tercapai”, ungkapnya.

Dari hasil wawancara peneliti diatas, dapat saya simpulkan bahwa memang tujuan dari kegiatan ini bisa dikata sudah hampir tercapai secara maksimal hanya perlu waktu dan upaya yang lebih keras lagi agar target dan tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai secara menyeluruh dan maksimal dari setiap desa yang ada di kabupaten pangkep.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strategi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Pangkep.

Strategi pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan dalam bidang ekonomi serta bidang lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

khususnya Kabupaten Pangkep. Dengan adanya berbagai program yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pangkep.

Adapun faktor penghambat secara internal dan eksternal dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pangkep berdasarkan wawancara Kepala Bagian Bidang dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dede Arfandi, SE) sebagai berikut:

“Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk dua tahun terakhir ini program pemberdayaan masyarakat terhambat oleh anggaran yang difokuskan pada penanganan penanggulangan dan penyebaran virus corona disease 19. Dengan adanya pembatasan dalam rangka memutus mata rantai covid-19 kegiatan ini sangat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan ini baik internal maupun eksternal”.

Dinas pemberdayaan masyarakat desa tidak dapat melaksanakan kegiatan tidak secara maksimal karena dalam melaksanakan kegiatan selalu ada pembatasan dan harus melaksanakan protocol kesehatan serta membatasi peserta kegiatan.

Pemerintah telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan yang menimbulkan berbagai kebijakan dan aturan dari pemerintah. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dan dampak yang ditimbulkan termasuk di beberapa sektor seperti, sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan lain-lain.

Pemerintah Kabupaten Pangkep mengeluhkan adanya hambatan mengenai anggaran untuk pemberdayaan masyarakat karena sejak terjadinya penyebaran virus covid-19 pemerintah fokuskan anggaran pada penanganan dan pencegahan penyebaran corona virus disease 2019. Dengan adanya aturan pembatasan kepada masyarakat ini juga sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatannya baik internal maupun eksternal.

Dan menjalankan kebijakan pemerintah seperti memberikan edukasi kepada masyarakat agar menjalankan protokol kesehatan. Dampak dari wabah covid-19 tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama pada Bumdes Desa Pitue Kabupaten Pangkep. Berdasarkan wawancara ketua BUMDES (Muhammad Nasrun, S.Sos) sebagai berikut:

“Pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi sangat terpengaruh dengan mewabahnya covid-19, sehingga semua kegiatan terhambat akibat dari berbagai kebijakan dan aturan, seperti work from home (bekerja dari rumah). Melaksanakan pertemuan daring, dan adanya pembatasan untuk keluar masuk suatu daerah”

Pemberdayaan masyarakat pada bidang ini sangat dirasakan oleh masyarakat Desa Pitue Kabupaten Pangkep karena adanya kebijakan perlakuan pembatasan, biasanya mereka berkumpul untuk kegiatan pembinaan, pelatihan, workshop kini sudah tidak bisa lagi.

Berdasarkan wawancara kepala Desa Pitue Kabupaten Pangkep (Barhaman, S.Sos., MM) sebagai berikut:

“Dengan adanya kebijakan dan aturan dari pemerintah yang paling diutamakan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan penyebaran covid-19. Pertemuan tatap muka dilakukan hanya dengan peserta terbatas. Pada sektor pariwisata sangat berpengaruh, produk dari BUMDES yang permintaan pelanggan yang cukup tinggi kini menurun akibat terpengaruh dengan pandemi corona virus disease 2019.”

Pemerintah Kabupaten Pangkep telah mengikuti kebijakan pemerintah dan melaksanakan aturan mengenai penanganan covid-19 khususnya di Desa Pitue Kabupaten Pangkep. Dengan memberikan edukasi terhadap warganya untuk mengikuti kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam hal penanganan covid-19.

Hambatan lain masih perlunya ditingkatkan pembinaan, pada BUMDES yang ada di desa seperti anggaran serta perhatian pemerintah untuk melengkapi sarana dan

prasarana untuk meningkatkan produksi masyarakat. Dan peningkatan sumber daya manusia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas penulis menarik kesimpulan tentang :

1. Strategi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Pangkep. Yaitu dengan melaksanakan pembinaan dan pelatihan ditingkat Kabupaten dan Desa, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidup masyarakatnya terutama dibidang ekonomi. Melakukan berbagai pelatihan seperti : 1) Pelatihan dan Pembinaan pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). 2) Melakukan Pelatihan dan Pembinaan UMKM. 3) Melakukan Pelatihan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes 4) Melakukan Pelatihan dan Pembinaan PKK.
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strategi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Pangkep yaitu sekarang ditanah air kita dilanda adanya penyebaran virus corona disease 19. Program pemberdayaan yang semestinya harus dilaksanakan banyak dialihkan pandemic covid-19 karena anggarannya dan difokuskan pada penanggulangan penyebaran covid-19. Faktor lain yaitu perlunya sarana dan prasarana serta peningkatan sumber daya manusia karena masyarakat desa masih banyak yang berpendidikan rendah.

B. Saran

1. Strategi pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa masih perlu ditingkatkan program-program yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pada bidang ekonomi.

2. Perlunya perhatian pemerintah untuk melengkapi sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan pada masyarakat, peningkatan anggaran dan sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistyani. (2004). *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media
- Asep Saefuddin, dkk. (2003). *Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Andi Prastowo. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media
- Arum Purbasari. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ternak Kelinci di Balai Belajar Bersama Hj. Mudrikah Desa Pagersari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal*. Skripsi. FIP UNY
- Ayu Purnami Wulandari. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah Di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga*. Skripsi. FIP UNY
- Bintarto, R. Prof. Dr. (2011). *Interaksi Desa-Kota*. Yogyakarta: Ghalia.
- Burhan Bungin. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hanif Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga
- Lexi. J. Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA
- Linda, Herliany. (1994). *Mitra Desa*. Bandung: PT. Pikiran Rakyat Mangkunegara,
- Anwar Prabu AA. (2009). *Perencanaan & Pengembangan SDM*. Bandung: Refika Aditama
- Nur Rika Puspita Sari. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Objek Wisata oleh Kelompok Sadar Wisata Dewabejo di Desa Bejiharjo, Kec. Karangmojo, Gunung Kidul*. Skripsi. FIP UNY.
- Mubarak, Z. (2010). *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Program PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*. Tesis. Program Studi Magister Teknik Pemberdayaan Wilayah Dan Kota. Undip. Semarang.

- Onny. S. Prijono dan A.M.W. Pranarka. (1996). *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya*. Jakarta: CSIS
- Puji Hadiyanti, 2008. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keterampilan Produktif Di PKBM Rawasari*, Jakarta Timur. *Perspektif Ilmu Pendidikan* - Vol. 17 Th. IX April 2008. Diakses pada Tanggal 11 Juni 2021
- Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Production Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. Alfabeta.
- Soetomo. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sri Kuntari. (2003). *Permasalahan Pengangguran di Pedesaan dan Alternatif Pemecahannya*. *Jurnal Media Informasi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: B2P3KS. Hlm 53
- Sunit Agus Tricahyono. (2008). *Pemberdayaan Komunitas Terpencil di Provinsi NTT*. Yogyakarta: B2P3KS.
- Sunyoto Usman. (2010). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suparjan & Hempri S. (2003). *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Totok dan Poerwoko. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Widjaja, HAW. (2005) *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- World Population Data Sheet. (2013). *Kependudukan*. Diakses dari <http://www.prb.org>

Dokumentasi Wawancara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Pangkep



Foto Kepala Bagian Pemberdayaan Kawasan Ekonomi





Program Pemberdayaan pada Bidang Ekonomi Desa Pitue









PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Tugu Merdeka No. 2 Telp. (0846) 21201 - 13 Pangkajene 90611

Pangkajene, 18 Agustus 2021

Kepada

Yth. Kepala Desa Pitalu
Di

Makassar

Referensi: sup. 1104/PMMD

Tgl.

Kel. Penyampaian

Dengan format yang tertera lampiran di bawah ini

Nama: Abdul Haris Has, AP

NIP: 19740702 199311 1 001

Pangkat/Gol: Pembina Utama Muda I/III

Jabatan: Kepala DPMD

Menyampaikan bahwa

Nama Mahasiswa: Rahmat

Stambuk: 10564.01069.14

Jurusan: Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi: "Strategi Pemerintah dalam Program

Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kab. Pangkep"

Berdasarkan surat yang kami terima dari Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1190/FSP/IA.1.VIII/VIII/1442 H/2021 H mahasiswa bersangkutan telah disetujui untuk melakukan penelitian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pangkajene dan Kepulauan sebagai syarat penyusunan skripsi.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PERNYATAAN

ABDUL HARIS HAS, AP
Pembina Utama Muda
19740702-199311-1-001

Tembusan: disampaikan kepada

Yth. 1. Bupati Pangkep (sebagai laporan) di Pangkajene

-Pangkep

Jln. Sultan Hasanuddin No. 7 Telp. (0410) 21200 – 137 Pangkajene 90611

Nomor ~~889~~ / 1109 / DPMD

Kepada
Yth. Kepala Desa Pitue
Di

Makassar

Nama	Abdul Haris Has, AP
NIP	19740702 199311 1 001
Pangkat/Gol	Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan	Kepala DPMD

Nama Mahasiswa	Rahmat
Stambuk	10564 01969 14
Jurusan	Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi	"Strategi Pemerintah dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kab. Pangkep"

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA,

ABDUL HARIS HAS, AP
Pembina Utama Muda
19740702 199311 1 001

Tembusan : disampaikan kepada

Vin. 1 Osmati Osmatun / Osmatun / Osmatun / Osmatun



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No 259 Makassar 90222 Telp: (0412) 866072, 881593; Fax: (0412) 885585

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama: Rahmat
NIM: 105640196914
Program Studi: Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	4 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	4 %	10 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya

Makassar, 28 Januari 2022

Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan

Rahmat S. Umar M.P.
NBM 964 591

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

BAB 1 Rahmat 105640196914

by Tahap Group

Submission date: 28 Jan 2022 08:28AM (UTC+0700)
Submission ID: 1749652480
File name: BAB 1 7X.docx (38,24K)
Word count: 712
Character count: 5031

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB 1 Rahmat 105649195514

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

1%

★ repository.unmaha.ac.id

Unpublished Sources

Exclude Quotes

Exclude Bibliography



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

BAB 2 Rahmat 105640196914
by Tabap Touap

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Submission date: 28-jan-2022 08:28AM (UTC+0700)
Submission ID: 1749652800
File name: BAB 2.docx (88.45K)
Word count: 5272
Character count: 37263

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

BAB 2 Rahmat 105640196914

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Submission date: 28 Jan 2022 08:22AM UTC+0700
Submission ID: 1749552900
File name: BAB 11.59.docx (88.65K)
Word count: 5272
Character count: 37263

BAB 2 Rahmat (050401969)

25%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

★ Abdurrahman Rahim Thaha, Luki Natika, Iwan Henri Kusnadi, "Efektivitas Program Pemberdayaan Nelayan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang (Studi Kasus di Kecamatan Blanakan)", *The World of Business Administration Journal*, 2020

Publication

Bibliography

Include bibliography

LULUS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
CENTRAL PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Universitas Muhammadiyah Makassar
Jl. G. I. G. S. No. 100
Makassar 90000
Telp. (0411) 5100000
Fax. (0411) 5100000
Email: info@umh.ac.id

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
BAB 3 RAIHAT 105040196914
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB 3 Rahmat 105640196914

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

JOURNAL ARTICLES

0%

STUDENT PAPERS

★ thelibpoenya.blogspot.com

Exclude quotes

Exclude bibliography

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
★ UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN ★



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

BAB 4 Rahmat 105640196914
by Tahap Tutop

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Submission date: 28 Jan 2022 08:29AM (UTC+0700)
Submission ID: 1749653236
File name: BAB_IV_48.docx (56.48K)
Word count: 4773
Character count: 32930

BAB 4 Rahmat 105040196914

2%

SMR ARTY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT FAVOR

★ www.radenamsel.com

Information Sources

Exclusive sources

Exclusive sources



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

BAB 5 Rahmat 105640196914

By Rahmat Tutup

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Submission date: 28 Jan 2022 08:30AM (UTC+0700)
Submission ID: 1249653450
File name: BAB V.55.docx (30.8K)
Word count: 521
Character count: 4066



RIWAYAT HIDUP



Rahmat, lahir di Kabupaten Soppeng tepatnya di Labuajang tanggal 27 November 1994 dari pasangan suami istri **Abd. Samad** dan **Hj. Rosnaini**. Penulis merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Penulis menempuh pendidikan dasar di SD 220 Tompoe tahun 2008, penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 3

Marioriwawo dan lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMK Karya Teknik Watangsoppeng lulus Pada tahun 2014, Kemudian penulis diterima di Fakultas Sospol Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhamadiyah Makassar. Berkat karunia Allah Swt. dan dukungan serta harapan dari orang tua dan juga keluarga besar lainnya yang senantiasa menjadi pegangan dan penyemangat agar penulis dapat menyelesaikan studi dengan skripsi yang berjudul "**Strategi Pemerintah Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Pangkep**" dengan sukses.